

Pengalaman Pariwisata Aksesibel bagi Pengguna Kursi Roda di Kota Bandung ke Destinasi Wisata Alam

Accessible Tourism Experience for Wheelchair Users in Bandung City to Nature Tourism Destinations

Rolik Subianto^a, Rahmat Priyanto^b

Program Studi Manajemen Pariwisata, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan,
Sekolah Tinggi Pariwisata ARS Internasional^{a,b}

^arolik.scn@gmail.com, ^brahmat@ars.ac.id

Disubmit : 20 Mei 2025, Diterima : 22 Juni 2025, Dipublikasi : 15 Juli 2025

Abstract

This study explores the experiences of wheelchair users in accessing natural tourism destinations in Bandung, Indonesia. Utilizing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with five individuals with physical disabilities who had firsthand experience visiting natural tourist sites. The findings reveal significant accessibility challenges, particularly in physical aspects such as steep and uneven pathways, insufficient ramps, limited accessible public transport, inadequate accommodations, and poorly maintained or repurposed support facilities. Psychological barriers were also identified, including intrapersonal issues (fear of being a burden, emotional distress, financial constraints), interpersonal challenges (discrimination, lack of empathy and social support), and structural obstacles (weak enforcement of disability rights regulations and lack of inclusive planning processes). These findings indicate that natural tourism in Bandung is still far from being inclusive. Therefore, collaborative efforts involving government, tourism managers, and the disability community are crucial to realizing a fair and accessible tourism system for all.

Keywords: Accessibility, Wheelchair Users, Natural Tourism, Disability, Inclusion

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengalaman pengguna kursi roda dalam mengakses destinasi wisata alam di Kota Bandung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap lima informan penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda dan memiliki pengalaman langsung dalam melakukan perjalanan wisata ke kawasan alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada aspek aksesibilitas fisik, seperti jalur yang curam, berbatu, dan tidak memiliki ramp sesuai standar; transportasi umum yang belum ramah disabilitas; akomodasi yang minim fasilitas aksesibel; serta fasilitas pendukung yang seringkali tidak layak atau dialihfungsikan. Selain itu, hambatan psikologis juga ditemukan dalam bentuk intrapersonal (rasa takut, kekhawatiran merepotkan orang lain, beban biaya), interpersonal (diskriminasi, minimnya empati dan dukungan sosial), serta struktural (lemahnya implementasi regulasi dan minimnya pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan wisata). Temuan ini mengindikasikan bahwa wisata alam di Kota Bandung belum sepenuhnya inklusif, dan diperlukan sinergi antara pemerintah, pengelola wisata, serta komunitas penyandang disabilitas untuk mewujudkan pariwisata yang berkeadilan dan dapat diakses oleh semua pihak.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Kursi Roda, Wisata Alam, Disabilitas, Inklusi

1. Pendahuluan

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global dan nasional. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia diperkirakan mencapai USD 11,1 triliun pada tahun 2024, setara dengan 10% dari PDB global (Amani, 2024). Di Indonesia, sektor ini memiliki potensi besar berkat

kekayaan alam dan budaya yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, namun belum sepenuhnya dikelola secara optimal (Rahma, 2020). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tren peningkatan signifikan perjalanan wisatawan domestik dari tahun 2019 hingga 2023, yang mengindikasikan tingginya minat terhadap destinasi wisata, khususnya wisata alam (Armavillia, 2023).

Potensi wisata alam Indonesia diperkuat oleh keanekaragaman hayati, di mana negara ini menyumbang 15,5% dari spesies flora dunia (Nurjannah, 2020). Namun, perkembangan sektor ini juga harus memperhatikan aspek aksesibilitas agar dapat dinikmati oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Prinsip pariwisata inklusif menekankan pada kesetaraan akses dan partisipasi, baik dari sisi penyedia layanan (host) maupun wisatawan (guest), dengan memperhatikan aksesibilitas fisik, sensorik, dan kognitif (Azhari, 2025).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak akses terhadap kegiatan pariwisata. Pada tahun 2024, tercatat lebih dari 9 juta penyandang disabilitas di Indonesia, dengan mayoritas mengalami disabilitas fisik (Kemendagri, 2024). Kota Bandung merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penyandang disabilitas yang tinggi, terutama disabilitas fisik. Namun, penyandang disabilitas di kota ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur yang ramah disabilitas dan minimnya edukasi publik (Priyadi, 2024).

Kursi roda menjadi alat bantu utama bagi individu dengan disabilitas fisik. Namun, berbagai hambatan mobilitas masih ditemui di lapangan, mulai dari akses jalan, pintu bangunan yang sempit, hingga kurangnya fasilitas umum yang sesuai standar aksesibilitas (Setiawan et al., 2024). Hal ini berdampak langsung pada rendahnya partisipasi wisatawan disabilitas dalam kegiatan wisata, termasuk wisata alam, yang umumnya memiliki karakteristik medan yang menantang (Pito Agustin Rudiana, 2021).

Meski demikian, penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas fisik memiliki minat tinggi untuk berwisata dan merasakan manfaat psikologis dari pengalaman tersebut (Chikuta et al., 2019). Namun, mereka kerap menghadapi hambatan intrinsik, interaktif, dan lingkungan yang menghambat partisipasi mereka dalam pariwisata (Perangin-Angin et al., 2023).

Oleh karena itu, penting untuk memahami pengalaman pengguna kursi roda dalam mengakses destinasi wisata alam, guna mendorong terciptanya kebijakan dan praktik pariwisata yang lebih inklusif dan ramah disabilitas, khususnya di Kota Bandung.

2. Metode

Metode penelitian adalah cabang ilmu yang membahas bagaimana suatu penelitian dilakukan, dimulai dengan menemukan, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan berdasarkan fakta atau gejala secara ilmiah (Sarwono & Handayani, 2021).

Dalam penelitian ini, metode kualitatif dipilih karena sesuai dengan masalah yang akan diteliti dan hubungannya erat dengan prosedur, alat, dan desain penelitian yang dipilih. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kualitatif bertujuan sebagai gambaran mengenai focus masalah penelitian penulis. Focus penelitian ini adalah pada pengalaman pariwisata aksesibel bagi pengguna kursi roda di Kota Bandung ke

destinasi wisata alam. Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung yang berfokus pada tujuan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif karena penelitian ini untuk mengeksplorasi, mempelajari dan memahami makna sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap memiliki masalah sosial atau kemanusiaan (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

Peneliti menggunakan studi kualitatif deskriptif dengan menggambarkan pengalaman pariwisata aksesibel pengguna kursi roda di Kota Bandung ke destinasi wisata alam, dengan menggali informasi dan mewawancarai secara langsung pengguna kursi roda di Kota Bandung yang memiliki pengalaman mengunjungi destinasi wisata alam guna mendapat informasi pengalaman yang diberikan oleh narasumber.

3. Hasil Dan Pembahasan

Aksesibilitas Fisik Jalur

Aksesibilitas fisik merupakan komponen krusial yang secara langsung memengaruhi kenyamanan serta keberhasilan pengalaman wisata bagi individu yang menggunakan kursi roda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak pengguna kursi roda masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan, seperti kondisi jalur yang tidak rata, berbatu, berpasir, serta kemiringan ramp yang tidak sesuai dengan standar keamanan. Situasi tersebut tidak hanya menyulitkan mobilitas, tetapi juga meningkatkan potensi risiko cedera. Ini sejalan dengan penelitian (Menzies et al., 2021) Infrastruktur yang tidak mendukung kebutuhan penyandang disabilitas merupakan salah satu hambatan utama yang membatasi partisipasi mereka dalam aktivitas wisata luar ruang. Ketidaksesuaian fasilitas fisik dengan prinsip aksesibilitas menyebabkan keterbatasan mobilitas dan mengurangi peluang bagi penyandang disabilitas untuk menikmati pengalaman wisata secara inklusif.

Menurut (Hadi, 2019) Kesulitan dalam mengakses fasilitas publik, serta sarana transportasi umum menjadi beban tambahan yang signifikan bagi penyandang disabilitas. Ketidaksesuaian infrastruktur, seperti ketiadaan jalur landai, ramp, maupun lift, serta minimnya kendaraan umum yang dilengkapi fasilitas aksesibilitas, secara langsung membatasi mobilitas dan menghambat partisipasi aktif mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Menurut (Muharam, 2024) Ramp yang dirancang untuk pengguna kursi roda idealnya memiliki kemiringan sekitar enam derajat. Kemiringan yang melebihi standar justru berpotensi membahayakan keselamatan pengguna. Ketidaksesuaian ramp dengan standar aksesibilitas umumnya disebabkan oleh kurangnya kolaborasi antara pihak perancang (vendor) dengan penyandang disabilitas sebagai pengguna langsung. Akibatnya, individu difabel kerap menghadapi hambatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, mengakses layanan kesehatan, dan menikmati fasilitas wisata. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup penyandang disabilitas, tetapi juga memperkuat proses marginalisasi sosial terhadap kelompok tersebut.

Kebijakan pemerintah yang mengatur pemberian kemudahan akses bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten. Selain itu, ketiadaan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan aksesibilitas menyebabkan upaya pemenuhan hak-hak difabel cenderung diabaikan. Oleh karena itu sangat penting untuk dikaji dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas, serta upaya pemerintah daerah dalam menyediakan aksesibilitas disabilitas(Hadi, 2019).

Aksesibilitas merupakan aspek yang berperan penting dalam menunjang pelaksanaan aktivitas sehari-hari. Bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas memiliki arti yang lebih mendalam, karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak atas kesetaraan dan partisipasi. Kesempatan yang sama dimaknai sebagai kondisi yang memberikan akses dan peluang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi diri dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dengan terciptanya kondisi tersebut, diharapkan penyandang disabilitas dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar, termasuk dalam hal berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Secara umum, tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memungkinkan penyandang disabilitas menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri, serta memperoleh pelayanan publik baik dalam bentuk akses fisik maupun nonfisik secara setara(Hadi, 2019).

Pengguna kursi roda kerap kali mengalami keterbatasan dalam menjangkau titik-titik utama di destinasi wisata alam. Meskipun beberapa area telah dirancang agar dapat diakses, jalur menuju lokasi-lokasi penting seperti tepi pantai atau spot-spot strategis lainnya masih belum ramah bagi pengguna kursi roda. Kondisi ini berdampak pada ketidakpuasan wisatawan penyandang disabilitas, karena mereka tidak memperoleh pengalaman wisata yang utuh dan setara dengan pengunjung non-disabilitas. (Groulx et al., 2022) menyatakan bahwa minimnya fasilitas yang aksesibel menimbulkan hambatan tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam aspek sosial dan psikologis bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini sering kali menimbulkan perasaan terpinggirkan ketika mereka terlibat dalam kegiatan wisata, karena tidak memperoleh pengalaman yang setara dengan individu lainnya.

Transportasi

Ketidakramahan infrastruktur terhadap penyandang disabilitas masih tampak jelas, misalnya pada sistem transportasi umum yang belum inklusif, ketiadaan trotoar yang mendukung mobilitas, serta minimnya area parkir yang dapat diakses oleh pengguna alat bantu. Selain itu, fasilitas seperti elevator yang terlalu sempit, sanitasi yang tidak memadai seperti lantai berlubang dan kondisi jalan yang licin, bergelombang, serta tidak rata, menjadi hambatan nyata yang menyulitkan pergerakan penyandang disabilitas di ruang publik.(Hadi, 2019).

Sebagian besar penyandang disabilitas tampaknya masih belum sepenuhnya menyadari hak mereka atas akses terhadap layanan publik yang memungkinkan partisipasi setara dalam berbagai aktivitas sosial sebagaimana individu non-disabilitas. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur yang benar-benar aksesibel bagi penyandang disabilitas dari berbagai kelompok usia menjadi prioritas di negara-negara maju, karena pemerintah dan masyarakat sipil di sana mengakui aksesibilitas sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia(Agustina & Nurzanah, 2019).Perangkat UU sebagaimana disinggung di atas itu, masih dilengkapi PP No.43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat, melalui penyediaan aksesibilitas. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum meliputi: a. aksesibilitas pada bangunan umum b. aksesibilitas pada jalan umum c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum d. aksesibilitas pada angkutan umum. Selanjutnya, dalam

pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa penyediaan aksesibilitas yang berbentuk nonfisik, meliputi: (a) pelayanan informasi; dan (b) pelayanan khusus. Secara rinci, ketentuan pasal 11 ayat (1) dan (2) serta pasal 12 PP No.43 Tahun 1998 tentang aksesibilitas pada bangunan umum dilaksanakan dengan menyediakan: (a) akses ke, dari dan di dalam bangunan; (b) pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat; (c) tempat parkir dan tempat naik turun penumpang; (d) toilet; (e) tempat minum; (f) tempat telepon; (g) peringatan darurat dan (h) tanda-tanda (signage) lainnya.

Aspek mobilitas dan aksesibilitas terhadap layanan publik di Kota Bandung masih memerlukan pembenahan, mengingat penyandang disabilitas kerap mengalami kesulitan dalam berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam kota. Hal ini disebabkan oleh minimnya fasilitas publik yang mendukung kebutuhan mobilitas penyandang disabilitas secara aman dan nyaman (BILIC, 2018) dalam (Dawud et al., 2019).

Akomodasi

Dalam upaya mengembangkan pariwisata yang inklusif bagi penyandang disabilitas, peran serta masyarakat menjadi aspek krusial, baik melalui keterlibatan langsung maupun tidak langsung. Masyarakat dapat berkontribusi dengan memberikan bantuan kepada wisatawan disabilitas dalam menjalani aktivitas wisata, ataupun melalui penyediaan aksesibilitas, seperti akomodasi yang ramah disabilitas (Herdiana & Siti Widharetno, 2022).

Adanya toilet khusus untuk penyandang disabilitas adalah salah satu kebutuhan penting dalam akomodasi perhotelan. Menurut penelitian (Berybe et al., 2023) menunjukkan bahwa Hotel LB1, LB2, dan LB3 belum menyediakan toilet khusus yang ramah disabilitas. Meskipun demikian, Hotel LB2 memiliki rencana untuk menambahkan fasilitas tersebut di masa mendatang. Ketidakhadiran toilet yang aksesibel berpotensi menurunkan kualitas pelayanan hotel, khususnya bagi tamu penyandang disabilitas. Pihak hotel sendiri mengakui bahwa tamu disabilitas masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah ketiadaan jalur landai dan pegangan tangan di area luar toilet. Padahal, keberadaan ramp dan handrail merupakan komponen esensial bagi individu dengan gangguan mobilitas seperti pengguna kursi roda untuk dapat mengakses toilet dan pintu masuk secara aman dan mandiri. Tanpa fasilitas tersebut, penyandang disabilitas fisik cenderung mengalami kesulitan dalam memasuki dan bergerak di dalam area fasilitas (Berybe et al., 2023).

Sejalan dengan penelitian oleh (Ahuma-Smith et al., 2020) yang Keberadaan toilet khusus yang ramah bagi penyandang disabilitas merupakan aspek penting dalam mewujudkan fasilitas yang inklusif. Berdasarkan hasil penelitian, pihak hotel tengah berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan fasilitas ramah disabilitas, salah satunya melalui penyediaan toilet yang dapat diakses oleh tamu dengan kebutuhan khusus. Saat ini, dari ketiga hotel yang diteliti, hanya Hotel LB2 yang telah menyediakan toilet dan wastafel khusus bagi penyandang disabilitas, dengan penyesuaian tinggi wastafel yang berbeda dari fasilitas umum pada umumnya. Selain itu, baik Hotel LB1 maupun LB2 telah memiliki setidaknya satu kamar yang diperuntukkan bagi tamu disabilitas, sesuai dengan ketentuan standar akomodasi yang inklusif (Berybe et al., 2023).

Ketiga hotel tersebut memiliki beberapa indikator aksesibilitas, di antaranya ketersediaan kursi roda dan ramp. Namun, ramp yang disediakan belum sepenuhnya dilengkapi dengan pegangan tangan, meskipun secara fungsional masih dapat

digunakan. Keberadaan ramp sangat penting untuk menunjang mobilitas, khususnya bagi individu penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda atau memiliki keterbatasan gerak, guna memastikan mereka dapat berpindah tempat dengan aman dan mandiri (Berybe et al., 2023).

Ramp yang tersedia di masing-masing hotel berperan dalam memfasilitasi akses tamu, khususnya penyandang disabilitas, menuju area-area publik di lingkungan hotel. Selain itu, seluruh hotel telah menyediakan kursi roda sebagai bagian dari fasilitas pendukung aksesibilitas. Ketersediaan aksesibilitas bagi pengguna kursi roda merupakan salah satu komponen penting dalam memenuhi kebutuhan tamu difabel dan menciptakan lingkungan yang inklusif (Wibawa & Kurnia, 2020).

Kesenjangan aksesibilitas di hotel berbintang menunjukkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas belum menjadi perhatian utama. Padahal, hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam hukum, dan hotel sebagai penyedia akomodasi wajib menjamin fasilitas yang inklusif bagi semua tamu, termasuk mereka yang merupakan penyandang disabilitas (Berybe et al., 2023). Untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, diperlukan aksesibilitas fisik yang memadai terhadap berbagai fasilitas dan infrastruktur, termasuk bangunan serta sarana transportasi. Akses ini mencakup kemudahan menuju institusi pendidikan, layanan kesehatan, tempat kerja, serta fasilitas dasar seperti toilet dan ramp sebagai alternatif dari anak tangga (Buana & Rudy, 2019).

Fasilitas Pendukung

Destinasi wisata idealnya dilengkapi dengan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, mengingat keberadaan fasilitas tersebut dianggap penting oleh pengunjung. Salah satu elemen yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan papan petunjuk arah di area wisata. Namun demikian, masih banyak lokasi wisata yang belum menyediakan sarana penerangan jalan, rambu lalu lintas, maupun papan informasi yang memadai untuk mempermudah akses menuju objek wisata. Di samping itu, keterbatasan akses terhadap jaringan internet di beberapa kawasan turut menjadi kendala yang menghambat kenyamanan dan pengalaman berwisata secara optimal (Rahmawati & Purwihartuti, 2022).

Objek wisata perlu memperhatikan aspek-aspek khusus guna memastikan bahwa pengunjung dengan kebutuhan khusus dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara optimal. Fasilitas universal yang mendukung aksesibilitas tersebut antara lain mencakup toilet yang ramah disabilitas, jalur dan pintu masuk yang dapat dilalui kursi roda, serta area parkir khusus bagi penyandang disabilitas (Gillovic & McIntosh, 2015). Contoh fasilitas yang menerapkan prinsip universal design antara lain mencakup pintu masuk yang dapat diakses oleh pengguna kursi roda, pegangan tangan untuk mendukung mobilitas penyandang disabilitas fisik, rantai taktil bagi penyandang disabilitas sensorik, serta jalur khusus yang dirancang untuk memfasilitasi pergerakan difabel secara aman dan mandiri (Pradani, 2020).

Menurut (Rahmawati & Purwihartuti, 2022) kondisi fasilitas pendukung di destinasi wisata masih tergolong kurang memadai. Hal ini tercermin dari ketiadaan pusat informasi dan papan identitas pada gerbang utama objek wisata. Selain itu, belum terdapat fasilitas yang diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas. Fasilitas kebersihan juga belum optimal, ditandai dengan kurangnya jumlah tempat sampah serta belum adanya pemisahan antara sampah organik dan anorganik.

Ketiadaan toko souvenir serta pos keamanan turut menunjukkan bahwa sarana pendukung di kawasan wisata ini belum dikembangkan secara komprehensif

Fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas fisik idealnya mencakup penyediaan layanan seperti caddy car atau penyewaan kursi roda. Keberadaan fasilitas tersebut berperan penting dalam menunjang mobilitas individu dengan disabilitas selama berada di kawasan wisata, serta merupakan elemen krusial dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan setara bagi semua pengunjung (Natalia et al., 2019).

Aksesibilitas Informasi

Selain hambatan fisik, penyandang disabilitas juga masih menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap informasi. Keterbatasan ini menjadi salah satu bentuk hambatan non-fisik yang dapat mengurangi partisipasi mereka dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam konteks pariwisata (Propiona, 2021). Dalam konteks pemenuhan hak asasi, penyandang disabilitas berhak atas akses informasi yang setara dengan individu non-disabilitas, sebagai bagian dari upaya mewujudkan inklusivitas dan nondiskriminasi (Kemensos, 2020).

Fasilitas non-fisik ini mencakup ketersediaan sumber informasi wisata yang jelas, kesiapan sumber daya manusia, serta prosedur dan etika pelayanan yang tepat, khususnya bagi pengelola objek wisata yang berinteraksi langsung dengan wisatawan disabilitas. Keberadaan informasi yang transparan mengenai tata cara berwisata dan atraksi yang tersedia sangat penting agar wisatawan, terutama mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat memperoleh pengalaman berwisata yang aman, nyaman, dan bermakna (Herdiana & Siti Widharetno, 2022).

Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan perangkat digital berbasis internet, akses terhadap informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan utama dalam menunjang berbagai aktivitas, termasuk bagi kelompok penyandang disabilitas (Buana & Rudy, 2019). Keberadaan sumber informasi yang jelas mengenai prosedur berwisata dan jenis atraksi yang tersedia merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap destinasi wisata. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh wisatawan, khususnya penyandang disabilitas, dapat memperoleh pengalaman berwisata yang aman, nyaman, dan terinformasi dengan baik (Khadijah & Rahmatin, 2024).

Berdasarkan ketersediaan sumber informasi bagi wisatawan penyandang disabilitas, tidak semua objek wisata mampu memberikan layanan informasi yang memadai. Sebagian besar destinasi wisata belum menyediakan layanan informasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari ketiadaan layanan pendukung yang membantu mereka mengakses atraksi wisata, tidak adanya buku panduan khusus difabel, serta tidak tersedianya pedoman evakuasi dan prosedur tanggap darurat yang disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas (Herdiana & Siti Widharetno, 2022).

Sebagian besar objek wisata, termasuk yang dikelola oleh pemerintah, belum sepenuhnya menyediakan sumber informasi yang memadai bagi wisatawan penyandang disabilitas. Bahkan, tidak sedikit destinasi yang sama sekali belum memiliki layanan informasi yang ditujukan secara khusus bagi kelompok ini. Padahal, wisatawan penyandang disabilitas membutuhkan kejelasan prosedural terkait aktivitas wisata yang akan dilakukan, mulai dari alur kedatangan hingga akses menuju atraksi. Prosedur yang diperlukan kerap berbeda dengan wisatawan non-difabel,

seperti penggunaan jalur khusus, pintu masuk yang terpisah, atau fasilitas penunjang lainnya (Khadijah & Rahmatin, 2024). Bahkan pada objek wisata yang dikelola pemerintah, akses terhadap informasi bagi penyandang disabilitas masih terbatas, mencerminkan kurangnya perhatian terhadap prinsip aksesibilitas dalam pelayanan wisata (Herdiana & Siti Widharetno, 2022).

Dalam konteks aksesibilitas informasi bagi wisatawan penyandang disabilitas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua objek wisata menyediakan layanan informasi yang mampu menjawab kebutuhan kelompok tersebut. Padahal, penyediaan fasilitas wisata yang aksesibel bukan hanya merupakan bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan rasa aman, kenyamanan, serta pengalaman positif bagi wisatawan disabilitas, khususnya di wilayah Kota Bandung (Herdiana & Siti Widharetno, 2022).

Sikap Pelayanan

Menurut (Simanjuntak et al., 2018) aksesibilitas pariwisata terdiri dari dua kategori utama: aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik. Aksesibilitas fisik mencakup prasarana seperti ramp dan pintu geser, sementara aksesibilitas non-fisik meliputi indikator berupa informasi yang andal, peraturan dan regulasi terkait wisata penyandang disabilitas, layanan khusus (special services), etika bantuan disabilitas, serta kapabilitas sumber daya manusia dalam melayani kebutuhan wisatawan difabel.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, rangkaian kegiatan wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Penyediaan fasilitas dan layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang lain yang dilakukan hanya untuk sementara waktu saja, tidak lebih dari setahun untuk bersantai, bisnis, dan tujuan lainnya (WTO, 2016)

Wisatawan penyandang disabilitas memerlukan kejelasan prosedur yang mencakup alur serta tata cara dalam menjalani aktivitas wisata. Prosedur ini pada umumnya berbeda dengan yang diterapkan bagi wisatawan non-disabilitas, karena mempertimbangkan kebutuhan khusus, seperti pelayanan yang disesuaikan oleh pihak pengelola destinasi. Kejelasan tersebut menjadi penting untuk menjamin terselenggaranya pelayanan yang tepat, aman, dan nyaman bagi wisatawan penyandang disabilitas (Herdiana & Siti Widharetno, 2022).

Meskipun memiliki hak yang setara dalam menikmati layanan dan aktivitas rekreasi, penyandang disabilitas sering kali terhambat oleh keterbatasan aksesibilitas di lingkungan pariwisata. Menurut (Zakiah et al., 2017) Konsep pariwisata yang ramah disabilitas menekankan pentingnya penyediaan layanan yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, serta tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang dirancang untuk memudahkan mereka dalam menikmati pengalaman berwisata secara setara dan mandiri.

Intrapersonal

Faktor intrapersonal merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi psikologis, kondisi fisik, serta kapasitas kognitif individu dalam merespons suatu situasi atau mengambil keputusan (Orakani, 2020). Aspek intrapersonal seperti kecemasan, minat, persepsi kemampuan, dan kemudahan akses memengaruhi

partisipasi wisatawan dalam aktivitas pariwisata. Dalam konteks teknologi pariwisata virtual bagi penyandang disabilitas, efektivitas penggunaannya dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu jenis dan tingkat keparahan disabilitas, ketidaknyamanan fisik saat penggunaan, serta tingkat kecemasan umum.

Kategori hambatan interpersonal mengacu pada kendala yang timbul dari hubungan sosial antarindividu. Hambatan ini umumnya disebabkan oleh kurangnya interaksi, komunikasi, atau kedekatan sosial, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap tingkat minat dan partisipasi individu dalam aktivitas waktu luang atau kegiatan wisata (Orakani, 2020).

Keterbatasan fisik yang bersifat intrapersonal merupakan konsekuensi langsung dari kondisi disabilitas yang dimiliki oleh individu, khususnya yang berdampak pada kemampuan dalam melakukan perjalanan. Hambatan fisik yang paling sering dilaporkan meliputi ketidakmampuan dalam menjalankan aktivitas dasar, seperti mendorong kursi roda secara mandiri, berdiri dalam antrean, membawa barang bawaan, berjalan, serta melakukan aktivitas lain yang membutuhkan kekuatan dan mobilitas tubuh. Tingkat keterlibatan fisik yang diperlukan dalam setiap aktivitas wisata menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian penyandang disabilitas, karena dapat menimbulkan kelelahan tergantung pada kapasitas fisik masing-masing individu. Selain itu, keterbatasan tersebut membuat wisatawan dengan gangguan mobilitas cenderung lebih sulit beradaptasi terhadap perubahan mendadak dalam rencana perjalanan, berbeda dengan wisatawan non-disabilitas yang umumnya lebih fleksibel dalam menyikapi perubahan (Orakani, 2020).

Perlu ditekankan bahwa keterbatasan fisik intrapersonal yang teridentifikasi dalam studi ini lebih merepresentasikan tantangan yang muncul selama berlangsungnya aktivitas wisata, bukan sebagai alasan utama untuk menolak partisipasi. Hambatan seperti menunggu dalam antrean, kesulitan naik-turun wahana, atau situasi terjebak di lokasi tertentu merupakan contoh kendala yang dialami partisipan saat kegiatan sedang berlangsung. Menariknya, tidak satu pun dari mereka menyatakan enggan berpartisipasi karena keterbatasan tersebut; sebaliknya, para partisipan mengungkapkan adanya ketidaknyamanan dan tantangan fisik yang mereka hadapi sebagai bagian dari pengalaman berwisata.

Keterbatasan emosional dalam kategori intrapersonal merujuk pada munculnya emosi negatif yang dirasakan oleh individu sebelum, selama, maupun saat berada di lokasi wisata. Hambatan ini dapat berupa kecemasan, ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui, dan tekanan psikologis lainnya yang berkaitan dengan aktivitas perjalanan. Meskipun bentuk-bentuk emosi ini kerap dialami oleh wisatawan secara umum, intensitasnya cenderung lebih tinggi pada wisatawan penyandang disabilitas, sehingga dapat memengaruhi kenyamanan dan partisipasi mereka secara signifikan dalam kegiatan pariwisata.

Menurut sejumlah penelitian, termasuk yang dilakukan oleh (Daniels et al., 2005) wisatawan penyandang disabilitas cenderung mengalami kecemasan dan ketidakpastian yang berlangsung secara berkelanjutan, baik selama perjalanan maupun ketika berada di lokasi wisata. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan fisik yang bersifat intrapersonal, terutama yang berkaitan dengan jenis disabilitas, kapasitas fisik, dan fungsi tubuh. Faktor-faktor tersebut dapat memicu munculnya hambatan emosional yang berdampak negatif terhadap pengalaman wisata secara keseluruhan.

Beberapa informan melaporkan mengalami kecemasan selama proses perjalanan, dengan tingkat yang bervariasi bergantung pada sejumlah faktor. Kecemasan tersebut umumnya dipicu oleh hambatan aksesibilitas yang dihadapi pada berbagai tahapan perjalanan. Tingkat intensitas kecemasan dipengaruhi oleh kompleksitas rute perjalanan, pengalaman berwisata sebelumnya, tingkat familiaritas terhadap lingkungan yang dituju, serta ketersediaan dukungan atau pendampingan selama perjalanan (Small et al., 2012). Kecemasan, rasa tidak pasti, dan ketakutan akan hal-hal yang tidak diketahui diungkapkan oleh informan sebagai hambatan emosional utama dalam perjalanan. Trauma masa lalu seperti insiden jatuh atau cedera turut memperburuk kondisi tersebut.

Hambatan emosional yang bersifat intrapersonal memiliki keterkaitan erat dengan munculnya perasaan negatif yang dialami oleh individu sebelum, selama, dan ketika berada di destinasi wisata. Bagi wisatawan penyandang disabilitas, intensitas perasaan seperti stres, ketidakpastian, dan rasa tidak aman cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wisatawan non-disabilitas, sehingga berpotensi memengaruhi kenyamanan dan kualitas pengalaman wisata mereka secara keseluruhan (Daniels et al., 2005). Di samping itu, keterbatasan fisik termasuk keterbatasan dalam mobilitas dan fungsi tubuh dapat memperkuat hambatan emosional yang dialami wisatawan penyandang disabilitas. Kondisi tersebut berkontribusi pada meningkatnya tingkat kecemasan selama kegiatan wisata, sehingga memperburuk pengalaman emosional secara keseluruhan.

Interpersonal

Hambatan interpersonal berkaitan dengan dinamika hubungan sosial dan interaksi antarindividu yang dapat memengaruhi partisipasi dalam aktivitas rekreasi. Contohnya, individu mungkin mengalami kesulitan untuk terlibat dalam kegiatan wisata karena tidak memiliki teman untuk beraktivitas bersama, atau karena relasi sosial yang dimiliki justru menimbulkan konflik atau ketidaknyamanan (Orakani, 2020).

Rendahnya tingkat keberdayaan penyandang disabilitas sebagian besar disebabkan oleh persoalan yang muncul dalam hubungan interpersonal, baik dengan keluarga, teman, guru, maupun penyedia lapangan kerja, serta interaksi dengan masyarakat secara lebih luas. Dalam konteks hubungan sosial tersebut, penyandang disabilitas kerap menghadapi pola interaksi yang sarat dengan stigma, norma eksklusif, serta perilaku diskriminatif, yang pada akhirnya membatasi ruang partisipasi dan pengembangan diri mereka (Hastuti et al., 2020).

Dalam konteks hubungan keluarga, khususnya di wilayah perdesaan, penyandang disabilitas kerap menghadapi stigma negatif yang menganggap keberadaan mereka sebagai aib keluarga. Pandangan ini menyebabkan sebagian keluarga memilih untuk membatasi ruang gerak anggota keluarga penyandang disabilitas dengan cara mengisolasi mereka di dalam rumah, melarang interaksi sosial, menghambat akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, bahkan hingga tidak mencatatkan identitas mereka dalam administrasi kependudukan (Watch, 2016). Dalam interaksi sosial sehari-hari, penyandang disabilitas kerap menghadapi perlakuan merendahkan yang mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan mereka. Stigma negatif, khususnya terhadap penyandang disabilitas psikososial, sering kali diwujudkan dalam bentuk panggilan merendahkan seperti 'barang rusak' atau 'pengemis'. Selain diabaikan, mereka juga kerap dianggap

tidak memiliki kemampuan atau potensi untuk berkontribusi secara produktif. Dalam beberapa kasus ekstrem, penyandang disabilitas mengalami tindakan perundungan hingga kekerasan fisik, seperti pelemparan batu, yang semakin memperkuat marginalisasi sosial terhadap mereka (Dwi Gansar Santi Wijayanti et al., 2016).

Peran dan dukungan lingkungan sosial bagi penyandang disabilitas memiliki implikasi yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku perjalanan mereka, terutama dalam meminimalisir hambatan perjalanan yang mereka hadapi

Relasi antara penyandang disabilitas dengan keluarga dan masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh pola pikir yang berlandaskan pada pendekatan model medis (Jannah, 2017). Dalam kerangka ini, individu dengan disabilitas fisik (tuna daksa) kerap dipersepsikan sebagai sosok yang lemah, tidak produktif, serta tidak mampu memberikan kontribusi bermakna. Akibatnya, perlakuan diskriminatif sering kali terjadi, yang diperkuat oleh stereotip negatif seperti anggapan bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang tidak beruntung dan memiliki kehidupan yang penuh hambatan. Pandangan semacam ini tidak hanya berdampak terhadap perlakuan sosial yang diterima, tetapi juga dapat memengaruhi konsep diri penyandang disabilitas, menimbulkan rasa rendah diri, kecemasan, serta kekhawatiran berlebih, yang pada akhirnya menghambat keterlibatan mereka dalam hubungan sosial dan interaksi interpersonal.

Pola komunikasi interpersonal penyandang disabilitas fisik (tuna daksa) dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni tuna daksa taraf ringan dan tuna daksa taraf berat. Penyandang tuna daksa taraf ringan umumnya tidak mengalami hambatan dalam proses komunikasi verbal, sehingga interaksi sosial dapat dilakukan secara langsung menggunakan bahasa lisan. Sebaliknya, penyandang tuna daksa taraf berat sering kali menghadapi kesulitan dalam menggunakan komunikasi verbal, sehingga mereka lebih mengandalkan komunikasi nonverbal, seperti bahasa isyarat, untuk berinteraksi dengan lawan bicaranya.

Faktor pendukung bagi tuna daksa taraf ringan dalam proses komunikasi mencakup kemudahan dalam menggunakan bahasa verbal serta dukungan emosional dari keluarga, yang mendorong mereka untuk lebih percaya diri dalam bersosialisasi. Sementara itu, bagi tuna daksa taraf berat, penggunaan komunikasi nonverbal seperti bahasa isyarat menjadi sarana utama untuk memfasilitasi komunikasi, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman kedua belah pihak terhadap sistem isyarat tersebut.

Adapun hambatan yang dihadapi tuna daksa taraf ringan lebih bersifat psikologis, yakni perasaan berbeda secara fisik yang dapat mengganggu kenyamanan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Di sisi lain, tuna daksa taraf berat menghadapi hambatan yang lebih kompleks, khususnya dalam memahami dan menggunakan bahasa isyarat, yang berujung pada kesulitan dalam menjalin komunikasi interpersonal yang efektif (ARUM, 2024). Dukungan dari lingkungan sosial memiliki peran yang penting dalam membantu penyandang disabilitas dalam melakukan perjalanan, terutama dalam mengurangi berbagai hambatan yang mereka hadapi selama mobilitas (Priyanto et al., 2025).

Struktural

Hambatan struktural merupakan faktor lingkungan eksternal yang memengaruhi keterlibatan individu dalam aktivitas, seperti keterbatasan waktu,

peluang yang terbatas, kurangnya informasi, kendala aksesibilitas, serta cuaca yang tidak kondusif (Crawford & and Godbey, 1987).

Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh (Small et al., 2012) mengungkapkan bahwa mayoritas penyandang disabilitas tidak menjadikan keterbatasan fisik (intrapersonal) maupun hubungan sosial (interpersonal) sebagai faktor utama yang menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan pariwisata. Sebaliknya, hambatan struktural justru lebih dominan disebut sebagai penghalang utama. Temuan ini menegaskan bahwa lingkungan sosial dan fisik tempat aktivitas pariwisata berlangsung memiliki peran signifikan dalam membatasi aksesibilitas. Kompleksitas hambatan-hambatan yang diidentifikasi dalam berbagai kajian mendukung pandangan bahwa hambatan tersebut bersifat sistemik dan berakar pada konstruksi sosial yang belum sepenuhnya inklusif (Daniels et al., 2005).

Temuan ini diperkuat oleh (Devile & Kastenholz, 2020) yang mengidentifikasi tiga faktor utama dalam dimensi struktural yang berperan penting dalam mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam aktivitas pariwisata, yaitu tersedianya akomodasi yang aksesibel, sistem transportasi yang mendukung, serta atraksi wisata yang dirancang ramah difabel.

(Daniels et al., 2005) mengemukakan bahwa hambatan struktural dalam sektor transportasi umumnya berasal dari belum optimalnya aksesibilitas pada berbagai moda transportasi. Meskipun sejumlah inisiatif telah dilakukan dalam dua dekade terakhir untuk meningkatkan inklusivitas sistem transportasi bagi penyandang disabilitas, transportasi tetap menjadi salah satu kendala paling signifikan yang dihadapi oleh wisatawan dengan keterbatasan mobilitas

Kereta api, secara khusus, diidentifikasi oleh informan sebagai moda transportasi yang menyulitkan bagi wisatawan dengan keterbatasan mobilitas. Ketidaksesuaian infrastruktur seperti tidak adanya akses yang layak menuju peron atau kabin kereta membatasi kemampuan mereka dalam merencanakan dan melakukan perjalanan secara mandiri. Situasi ini mencerminkan bahwa hambatan struktural dalam sistem transportasi berdampak langsung terhadap keputusan dan pengalaman wisata penyandang disabilitas.

Temuan ini memperkuat studi sebelumnya yang menyatakan bahwa keterbatasan akses fisik dalam sistem transportasi publik merupakan hambatan struktural utama yang membatasi keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan wisata (Daniels et al., 2005). Upaya peningkatan aksesibilitas transportasi selama dua dekade terakhir belum sepenuhnya mengatasi kendala yang dihadapi penyandang disabilitas, karena moda seperti kereta api dan bus antarkota masih belum optimal, sementara pesawat terbang pun dapat menimbulkan hambatan emosional akibat pengalaman negatif selama perjalanan

Selain itu, hambatan struktural juga ditemukan dalam fasilitas fisik yang tersedia di kawasan wisata yang dituju oleh penyandang disabilitas mobilitas. Studi ini mencatat berbagai bentuk keterbatasan, seperti akses kamar mandi yang tidak memadai, ketidaksesuaian elemen bangunan, fasilitas yang tidak dirancang inklusif, keterbatasan lahan parkir, desain furnitur dan peralatan yang tidak ergonomis, serta ketersediaan akomodasi yang meskipun ramah disabilitas, namun belum mampu mengakomodasi keluarga atau kelompok dalam satu unit secara layak

Di antara berbagai elemen pendukung infrastruktur, fasilitas kamar mandi yang dapat diakses merupakan komponen yang paling krusial dalam bangunan, akomodasi, maupun area wisata bagi individu dengan keterbatasan mobilitas (Darcy, 2010).

Permasalahan aksesibilitas masih menjadi isu utama yang dihadapi oleh wisatawan penyandang disabilitas, mengingat mereka sering kali dihadapkan pada lingkungan yang tidak inklusif dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, meskipun suatu bangunan dinyatakan sebagai aksesibel, hal tersebut belum tentu menjamin bahwa seluruh area dan fasilitas di dalamnya benar-benar dapat digunakan secara mandiri oleh seluruh individu, khususnya pengguna kursi roda (Orakani, 2020).

Wisatawan dengan keterbatasan mobilitas memiliki kebutuhan khusus terhadap fasilitas parkir yang memadai, terutama pada waktu-waktu tertentu selama perjalanan wisata. Ketersediaan ruang parkir menjadi salah satu aspek penting dari hambatan struktural, yang mencakup tantangan dalam hal kemudahan akses menuju area parkir, jarak yang dekat dengan pintu masuk utama, jumlah ruang parkir yang mencukupi, serta keberadaan jalur akses yang berkesinambungan dan aman dari area parkir menuju fasilitas utama (Woodbury et al., 2017).

Keterbatasan struktural juga dapat berasal dari faktor lingkungan dan kondisi geografis yang secara langsung berkaitan dengan karakteristik alam suatu destinasi, seperti area terbuka, medan, cuaca, serta akses terhadap aktivitas berbasis alam. Elemen-elemen ini sering kali tidak dapat diakses oleh wisatawan dengan keterbatasan mobilitas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena daya tarik utama banyak destinasi pariwisata justru terletak pada keunggulan alamnya, yang pada umumnya belum dirancang dengan prinsip universal design untuk dapat diakses oleh semua orang (Smith, 1987). Seluruh informan dalam penelitian ini melaporkan keterbatasan dalam mengakses ruang luar, terutama disebabkan oleh medan yang tidak rata, permukaan jalan yang menantang, jarak yang jauh, serta cuaca yang kurang mendukung. Hambatan utama yang diidentifikasi adalah kesulitan bahkan ketidakmampuan dalam menjangkau ruang terbuka dan mengikuti aktivitas wisata berbasis alam secara setara.

Dalam praktiknya, pembuat kebijakan di sektor pariwisata kerap merancang kebijakan, peraturan, serta prosedur yang secara tidak langsung menghasilkan bentuk-bentuk eksklusif, pembatasan, atau bahkan diskriminasi terhadap wisatawan penyandang disabilitas, meskipun kebijakan tersebut tidak dirancang dengan tujuan diskriminatif (Orakani, 2020).

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pengguna kursi roda menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses destinasi wisata alam di Kota Bandung, baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik, infrastruktur seperti jalur wisata, transportasi umum, akomodasi, dan fasilitas pendukung belum sepenuhnya memenuhi prinsip desain universal. Kendala utama mencakup jalur yang tidak ramah kursi roda, keterbatasan fasilitas transportasi inklusif, serta minimnya akomodasi dan sarana publik yang dapat diakses secara mandiri. Selain itu, sikap petugas dan masyarakat yang kurang empatik turut memperburuk pengalaman wisata disabilitas. Dari sisi psikologis, hambatan mencakup rasa khawatir, trauma sosial, serta kurangnya pemahaman masyarakat dalam interaksi inklusif. Hambatan struktural juga tercermin dari lemahnya regulasi dan kurangnya pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan destinasi.

Sebagai rekomendasi, dibutuhkan penguatan infrastruktur berbasis desain universal, optimalisasi moda transportasi publik inklusif, dan peningkatan akomodasi ramah disabilitas. Penyediaan informasi aksesibilitas yang akurat dan terstandar,

pelatihan sumber daya manusia pariwisata, serta penguatan regulasi dan pengawasan menjadi langkah strategis yang mendesak. Di samping itu, pemberdayaan komunitas dan dukungan logistik seperti subsidi alat bantu dan relawan pendamping dapat mengurangi hambatan psikososial. Pendekatan multidimensi ini penting untuk mewujudkan sistem pariwisata alam yang inklusif dan berkeadilan.

5. Daftar Pustaka

- Agustina, I. D., & Nurzanah, W. (2019). *STUDI AKSESIBILITAS TRANSPORTASI BERKELANJUTAN UNTUK PENYANDANG CACAT (DISABILITAS) DI PUSAT KOTA MEDAN PENDAHULUAN Latar Belakang Sustainable city (kota berkelanjutan) telah menjadi issue hangat dalam dekade terakhir , dimana issue ini menitik beratk. 31, 50–63.*
- Ahuma-Smith, C., Dokyi, G., Bavuno, S., & Dokyi, G. O. (2020). Access to Public Toilets Facilities Amongst Physically Challenged People. *International Journal of Engineering and Technology*, 9(7), 1353–1357. <https://www.researchgate.net/publication/343335851>
- Amani, N. K. A. K. (2024). WTTC Bidik Industri Wisata Beri Kontribusi 10% PDB Global pada 2024. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5692083/wttc-bidik-industri-wisata-beri-kontribusi-10-pdb-global-pada-2024?page=2>.
- Armavillia, K. E. A. K. E. (2023). Jumlah Perjalanan Wisatawan Domestik 5 tahun terakhir. *GoodStats*. <https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-perjalanan-wisatawan-domestik-5-tahun-terakhir-yVnf8>
- ARUM, T. D. S. (2024). *POLA KOMUNIKASI ANTARPRIBADI KOMUNITAS DISABILITAS DI RUMAH MERAH PUTIH DIFABEL BERKARYA DI KOTA PALU (STUDI KASUS PADA TUNARUNGU DAN TUNADAKSA).*
- Azhari, A. (2025). Indonesia dan Tantangan Mewujudkan Pariwisata Inklusif. *Detiktravel*. <https://travel.detik.com/travel-news/d-7724798/indonesia-dan-tantangan-mewujudkan-pariwisata-inklusif>
- Berybe, G. A., Duman, M., Wahyudi, A., & ... (2023). Pengembangan Pariwisata Inklusif: Analisis Fasilitas Ramah Disabilitas pada Hotel Berbintang di Labuan Bajo. *Innovative: Journal Of ...*, 3, 11402–11417. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/9623/6593>
- Buana, I. K. S., & Rudy, D. G. (2019). Aksesibilitas sebagai bentuk kemandirian bagi difabel dalam menggunakan fasilitas pelayanan publik pada perbankan. *Kertha Negara ...*, 1–14. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1336369&val=908&title=AKSESIBILITAS SEBAGAI BENTUK KEMANDIRIAN BAGI DIFABEL DALAM MENGGUNAKAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PERBANKAN](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1336369&val=908&title=AKSESIBILITAS%20SEBAGAI%20BENTUK%20KEMANDIRIAN%20BAGI%20DIFABEL%20DALAM%20MENGUNAKAN%20FASILITAS%20PELAYANAN%20PUBLIK%20PADA%20PERBANKAN)
- Chikuta, O., du Plessis, E., & Saayman, M. (2019). Accessibility Expectations of Tourists with Disabilities in National Parks. *Tourism Planning and Development*, 16(1), 75–92. <https://doi.org/10.1080/21568316.2018.1447509>
- Crawford, D. W., & and Godbey, G. (1987). Reconceptualizing barriers to family leisure. *Leisure Sciences*, 9(2), 119–127. <https://doi.org/10.1080/01490408709512151>
- Daniels, M. J., Drogin Rodgers, E. B., & Wiggins, B. P. (2005). “Travel Tales”: An interpretive analysis of constraints and negotiations to pleasure travel as

- experienced by persons with physical disabilities. *Tourism Management*, 26(6), 919–930. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.06.010>
- Darcy, S. (2010). Inherent complexity: Disability, accessible tourism and accommodation information preferences. *Tourism Management*, 31(6), 816–826. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.08.010>
- Dawud, J., Mursalim, S. W., Anomsari, E. T., & Taufik, N. I. (2019). Strategi Perwujudan Kota Bandung Sebagai Kota Ramah Penyandang Disabilitas: Sebuah Perspektif Aksesibilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(2), 141–159. <https://doi.org/10.33509/jan.v25i2.543>
- Deville, E., & Kastenholz, E. (2020). *Accessible tourism experiences: the voice of people with visual disabilities* (pp. 84–104). <https://doi.org/10.4324/9780429290077-6>
- Dwi Gansar Santi Wijayanti, Soegiyanto, & Nasuka. (2016). *Journal of Physical Education and Sport*. 5(1), 17–23.
- Gillovic, B., & McIntosh, A. (2015). Stakeholder perspectives of the future of accessible tourism in New Zealand. *Journal of Tourism Futures*, 1(3), 223–239. <https://doi.org/10.1108/JTF-04-2015-0013>
- Groulx, M., Freeman, S., & Lemieux, C. (2022). Accessible nature beyond city limits – A scoping review. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 37, 100490. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jort.2022.100490>
- Hadi, I. (2019). Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Al-Himayah*, Volume 3(2), 223–245.
- Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. *The SMERU Research Institute*, 1–61. www.smeru.or.id.
- Herdiana, D., & Siti Widharetno, M. (2022). Aksesibilitas Objek Wisata Bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas di Kota Bandung. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality and Destination*, 1(3), 122–134. <https://doi.org/10.55123/toba.v1i3.785>
- Jannah, M. (2017). *Relasi Gender dalam Keluarga Difabel Tuna Daksa Pasca Kecelakaan*. Kemendagri. (2024). *KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*. <https://e-database.kemendagri.go.id/kemendagri/dataset/1168/tabel-data>
- Kemensos. (2020). Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas. *Kemensos*. <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas>
- Khadijah, F., & Rahmatin, L. S. (2024). *Analisis Kelayakan Aksesibilitas Disabilitas di Taman*. 7, 13629–13634.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Menzies, A., Mazan, C., Borisoff, J. F., Mattie, J. L., & Mortenson, W. Ben. (2021). Outdoor recreation among wheeled mobility users: perceived barriers and facilitators. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 16(4), 384–390. <https://doi.org/10.1080/17483107.2019.1710772>
- Muharam, Y. (2024). Berdiskusi Bersama Bilic, Mengukur Sejauh Mana Bandung sebagai Kota Inklusif bagi Kawan-kawan Difabel. *Bandung Bergerak*. <https://bandungbergerak.id/article/detail/1597952/berdiskusi-bersama-bilic-mengukur-sejauh-mana-bandung-sebagai-kota-inklusif-bagi-kawan-kawan-difabel>
- Natalia, P., Clara, R. A., Simon, D., Noelia, G., & Barbara, A. (2019). Critical elements in accessible tourism for destination competitiveness and comparison: Principal

- component analysis from Oceania and South America. *Tourism Management*, 75, 169–185. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.04.012>
- Nurjannah, R. (2020). Analisis Potensi Fisik Wisata Alam Situ Gunung Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kecamatan Kadudampit, Sukabumi. *KOCENIN Serial Konferens*, 1(1), 1–7.
- Orakani, S. N. (2020). *From constraints to participation: A study of the behaviour of New Zealand travellers with mobility impairments*. <http://researcharchive.vuw.ac.nz/handle/10063/8562>
- Perangin-Angin, R., Tavakoli, R., & Kusumo, C. (2023). Inclusive tourism: the experiences and expectations of Indonesian wheelchair tourists in nature tourism. *Tourism Recreation Research*, 48(6), 955–968. <https://doi.org/10.1080/02508281.2023.2221092>
- Pito Agustin Rudiana. (2021). Tantangan Difabel Saat Travelling, Mulai dari Toilet sampai Stigma Orang Sakit. *TEMPO.CO*. <https://www.tempo.co/politik/tantangan-difabel-saat-travelling-mulai-dari-toilet-sampai-stigma-orang-sakit-482128>
- Pradani, S. W. (2020). Perilaku Masyarakat di Ruang Terbuka Publik Alun- Alun Kabupaten Blora Community Behavior in Public Open Space of Blora District Square. *Jurnal TATA LOKA*, 22(1), 50–60.
- Priyadi, H. (2024). Angka Penyandang Disabilitas di Kota Bandung: Tanggung Jawab yang Masih Berat. *Jabarekspres.Com*. <https://jabarekspres.com/berita/2024/12/11/angka-penyandang-disabilitas-di-kota-bandung-tanggung-jawab-yang-masih-berat/2/>
- Priyanto, R., Hurriyati, R., Gaffar, V., & Furqon, C. (2025). The Role of Psychological Factors in Travel Constraints Effect on Leisure Travel Participation of People with Disabilities. *Journal of Tourism and Services*, 16(30), 49–72. <https://doi.org/10.29036/1xbgfz28>
- Propiona, J. K. (2021). Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10, 1–18. <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47635>
- Rahma, A. A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jnp.52178>
- Rahmawati, M., & Purwihartuti, K. (2022). Analisis Kinerja Aset Fisik Fasilitas Wisata Riung Gunung Berdasarkan Destination Attributes di Kabupaten Bandung. *Prosiding The 13th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 13–14.
- Sarwono, A. E., & Handayani, A. (2021). *Metode Kuantitatif*. Percetakan kurnia.
- Setiawan, A., Ariyanto, D., & Sukmawati, B. (2024). Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Wisatawan Disabilitas Pengguna Kursi Roda. *Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 511–520. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.9265>
- Simanjuntak, C., Gede, L., Kusuma, L., Gusti, N., Susrami, A., Pariwisata, F., Udayana, U., Pariwisata, F., Udayana, U., Pariwisata, F., & Udayana, U. (2018). *Penyediaan aksesibilitas bagi wisatawan penyandang disabilitas oleh stakeholder di kotamadya Denpasar kecamatan Denpasar selatan*. 6(1), 55–69.
- Small, J., Darcy, S., & Packer, T. (2012). The embodied tourist experiences of people with vision impairment: Management implications beyond the visual gaze. *Tourism Management*, 33(4), 941–950.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.09.015>
- Smith, R. W. (1987). Leisure of disable tourists: Barriers to participation. *Annals of Tourism Research*, 14(3), 376–389.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0160-7383\(87\)90109-5](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0160-7383(87)90109-5)
- Watch, H. R. (2016). *World report / 2016*.
- Wibawa, B. A., & Kurnia, W. (2020). Standar Dan Implementasi Desain Universal Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. In *Deepublish*. Deepublish.
- Woodbury, C., Stephens-pisecco, T. L., & Rademacher, J. A. (2017). *Results of a Disability Awareness Assignment Conducted with Preservice Teachers*. 28(1), 1–18.
- WTO. (2016). *World Tourism Day 2016: ?Tourism for All? promoting universal accessibility?? Good Practices in the Accessible Tourism Supply Chain*. World Tourism Organization. <https://doi.org/doi:10.18111/9789284418138>
- Zakiyah, U., Husein, R., Muzwardi, A., Pemerintahan, M. I., & Yogyakarta, U. M. (2017). *Disabilitas Di Kota Yogyakarta*.